

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu asas pembangunan daerah adalah desentralisasi, menurut ketentuan umum UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan dari asas desentralisasi adalah berlakunya otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, Prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Maryati dan Endarwati, (2010)

Implementasi otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan desentralisasi fiskal, yaitu pelimpahan kewenangan di bidang keuangan dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. Pembentukan daerah baru atau pemekaran wilayah terjadi secara luas, tidak hanya terjadi pada daerah yang secara geografis kaya akan sumber daya alam ataupun memiliki potensi industri dan perdagangan yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan daerah,

tetapi juga terjadi pada daerah yang miskin sumber daya alam dan terbelakang secara ekonomi, sehingga pada akhirnya pemekaran tersebut menjadi beban fiskal bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oktora dan Pontoh, (2013)

Dampak pelaksanaan otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah dalam menciptakan *good governance* sebagai prasyarat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah karena terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Indarti dan Sugiartina (2012). Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004) dalam (Arwati dan Hardiati, 2013).

Dengan adanya otonomi daerah pula, maka dengan tegas terjadi pemisahan fungsi antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan

aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Halim, 2006) dalam (Arwati dan Hardiati, 2013).

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah Maryati dan Endrawati, (2010).

Penelitian ini mengembangkan dari artikel Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Semarang Periode Tahun 2005-2009 dalam Indarti dan Sugiartiana, (2012). Berdasarkan Keterbatasan dalam Indarti dan Sugiartiana, (2012) Peneliti menambah variabel independen yaitu Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Sehingga bisa melengkapi variabel independen serta kota dan tahun penelitian ini dilakukan di Yogyakarta tahun periode 2007-2013.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap anggaran belanja modal pada pemerintah DI Yogyakarta?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal pada pemerintah DI Yogyakarta?
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal pada pemerintah DI Yogyakarta?

4. Apakah dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal pada pemerintah DI Yogyakarta?
5. Apakah dana bagi hasil (DBH) terhadap berpengaruh anggaran belanja modal pada pemerintah DI Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap anggaran belanja modal pada pemerintahan DI Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran belanja modal pada pemerintahan DI Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap anggaran belanja modal pada pemerintahan DI Yogyakarta.
4. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap anggaran belanja modal pada pemerintahan DI Yogyakarta.
5. Untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap anggaran belanja modal pada pemerintahan DI Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian, pengetahuan dan wawasan peneliti akan bertambah. Peneliti dapat memberikan pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

2. Bagi Pemerintahan Daerah

Pada pemerintah daerah, diharapkan dapat menggunakan dana APBD dengan benar tanpa adanya kecurangan dalam mengelola dana tersebut.

3. Bagi Mahasiswa

Dengan membaca hasil penelitian, diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa jurusan akuntansi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wawasan tambahan mahasiswa jurusan akuntansi agar dapat mengetahui tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

4. Peneliti Berikutnya

Menambah literatur dan referensi, terutama untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Anggaran Belanja Modal.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembahasan mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal ini dibahas dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai deskripsi teoritis variabel, tinjauan penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukurannya, dan metode analisis data.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang penyajian dan analisis data. Pada bab ini disajikan dan dijelaskan tentang analisis data dan pembahasan atas hasil analisis yang merupakan jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan.

BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik untuk subyek penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya.